

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan Berkelanjutan (SDG) adalah rencana aksi yang disepakati secara global dan disepakati oleh para tokoh dunia, termasuk Indonesia, untuk memberantas kemiskinan, mengurangi ketimpangan, dan melindungi lingkungan. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan mencakup 17 tujuan dan 169 target yang diharapkan dapat dicapai pada tahun 2030. *Sustainable Development Goals* (SDGs) memiliki 17 tujuan diantaranya mengakhiri kemiskinan, mengakhiri kelaparan, hidup sehat dan sejahtera, pendidikan berkualitas, kesetaraan gender, air bersih dan sanitasi, energi yang terjangkau dan terbarukan, pekerjaan yang layak dan pertumbuhan ekonomi, inovasi dan infrastruktur industri, mengurangi kesenjangan, kota dan tempat yang berkelanjutan tempat tinggal, konsumsi dan produksi yang berkelanjutan, memerangi perubahan iklim, sumber daya laut yang berkelanjutan, pengelolaan ekosistem darat yang berkelanjutan, hak atas perdamaian dan kelembagaan yang kuat, serta kemitraan yang berkelanjutan.



Sumber: Bappenas (2018)

Gambar 1.1. Tujuan SDGs

Salah satu tujuan SDGs yang keempat adalah mewujudkan Pendidikan yang berkualitas. Dimana salah satu indikatornya yakni meningkatnya tingkat partisipasi remaja dan dewasa dalam pendidikan dan pelatihan formal dan non formal dalam 12 bulan terakhir, menurut jenis kelamin. Salah satu target yang ingin dicapai pada tujuan keempat SDGs yakni meningkatnya Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi (PT). Tidak dapat dipungkiri kualitas sumber daya manusia sangat berpengaruh besar bagi pembangunan suatu bangsa. Indonesia adalah negara yang populasi penduduk nya cukup tinggi. Menurut Laporan *World Population Review* jumlah penduduk di Indonesia mencapai 275,5 juta jiwa. Sedangkan Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), total penduduk di Indonesia diperkirakan mencapai 275,77 juta jiwa di tahun 2022. Angka itu meningkat 1,13 persen dari tahun sebelumnya sebanyak 272,68 juta jiwa. Hal ini menempatkan Indonesia berada di peringkat keempat penduduk terbanyak di antara negara G20. Banyaknya jumlah penduduk Indonesia tentu harus dibarengi oleh kualitas sumber daya manusia yang tinggi. Sebab adanya kesenjangan antara jumlah penduduk dan kualitas sumber daya manusia akan berdampak buruk bagi suatu negara. Hal ini juga masih menjadi permasalahan utama bagi bangsa Indonesia, dimana jumlah penduduk yang sangat tinggi belum diimbangi dengan kualitas yang unggul. Berdasarkan data BPS, angkatan kerja Indonesia mayoritas tamatan SD dan SMP (tidak pernah/pernah/belum pernah SD/tamat SD) dengan besaran 39,10 persen. Hal itu membuktikan kualitas sumber daya manusia di Indonesia masih dikatakan rendah.

Jika dilihat dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM) skor negara Indonesia masih tertinggal dengan negara lainnya yakni menempati peringkat 114 di dunia. Indeks Pembangunan Manusia Indonesia (IPM) pada tahun 2022 kurang lebih 72,91.



Sumber: Laporan World Index Development

Gambar 1.2. Peringkat Negara Berdasarkan IPM

Skor tersebut meningkat dari tahun sebelumnya. Walaupun begitu masih dibutuhkan adanya peningkatan kualitas SDM di Indonesia mengingat tingginya populasi penduduk Indonesia. Pemerintah Indonesia terus berupaya untuk meningkatkan kualitas SDM salah satunya dengan mengalokasikan 20% anggaran di bidang Pendidikan. Selain itu, pemerintah Indonesia telah menyatakan minatnya terhadap pendidikan dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2022 yang mengubah Dokumen Pendanaan Pendidikan 48/2008. PP tersebut mengubah kewenangan Kementerian dalam menetapkan alokasi anggaran pendidikan yang tertuang dalam APBN dan APBD. Presiden juga menugaskan Menko PMK untuk mengoordinasikan perubahan administrasi Dana Pendidikan. Dalam hal ini, Menko

PMK bertindak sebagai Ketua Badan yang kemudian diamanatkan oleh Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2021.

Salah satu provinsi terpadat di Indonesia adalah Jawa Tengah yang merupakan provinsi ketiga yang memiliki penduduk banyak di Indonesia setelah Jawa Barat dan Jawa Timur. Menurut data Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Kependudukan (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri, Provinsi Jawa Tengah memiliki luas wilayah 34.334 kilometer persegi dan jumlah penduduk 37,49 juta jiwa. Jika dilihat dari kualitas sumber daya manusia nya Provinsi Jawa Tengah tergolong sebagai daerah dengan kualitas SDM baik dibandingkan dengan provinsi lain. Hal ini ditunjukkan dengan adanya Indeks Pembangunan Manusia Jawa Tengah tahun 2020 meningkat. Meski terkena dampak pandemi Covid-19, IPM Jawa Tengah berhasil naik secara positif sebesar 0,14 poin pada tahun 2020, dari 71,73 poin pada tahun 2019 menjadi 71,87 poin pada tahun 2020. Sejak tahun 2017, tingkat pembangunan manusia di Jawa Tengah mencapai "tingkat tinggi". kategori (IPM lebih dari 70), sedangkan tahun 2010–2016 masih dalam kategori sedang ($60 \leq \text{IPM} < 70$). Pada musim 2019-2020, komponen IPM meningkat. Peluang bayi baru lahir di Jawa Tengah untuk hidup sampai dengan 74,37 tahun lebih tinggi 0,14 tahun dibandingkan dengan bayi yang lahir pada tahun 2019. Anak usia 7 tahun memiliki kesempatan bersekolah selama 12,70 tahun, meningkat 0,02 tahun. Orang berusia 25 tahun lebih memiliki rata-rata masa pelatihan 7,69 tahun (dalam kategori 1), yaitu kenaikan 0,16 tahun. Namun, anggaran keluar untuk publik per kapita yang disesuaikan dengan PPP menurun sebesar 172.000 rubel per tahun menjadi 10.930 juta rubel pada tahun 2020. Hal tersebut akan menjadi

peluang untuk provinsi Jawa Tengah dalam memajukan daerahnya. Namun demikian masih ada beberapa daerah dengan kualitas SDM yang sangat rendah di Jawa Tengah, salah satunya Kabupaten Wonogiri.

Kabupaten Wonogiri yakni kabupaten yang berada di Provinsi Jawa Tengah dimana memiliki luas sekitar 1.793,67 km dan jumlah penduduk sekitar 1.043.576 jiwa. Luas wilayah tersebut menjadikan Wonogiri masuk dalam daftar wilayah paling luas nomor lima di Jawa Tengah. Kabupaten Wonogiri masih menjadi salah satu daerah yang memiliki permasalahan yakni rendahnya kualitas SDM. Hal ini dibuktikan oleh Menurut data BPS tahun 2017, Kabupaten Wonogiri memiliki IPM paling rendah se- Eks Karesidenan Surakarta sebesar 67,76 persen, angka itu masih di bawah rata-rata IPM nasional sebesar 69,55 persen (69,49 persen) di Jawa Tengah. Sedangkan IPM Kabupaten Wonogiri naik sebesar 71,04% berdasarkan BPS 2020-2022. Namun demikian angka tersebut masih menempatkan Wonogiri sebagai kabupaten dengan IPM terendah se eks Karesidenan Surakarta sebagaimana bisa dilihat di tabel berikut:

Tabel 1.1. Indeks Pembangunan Manusia se Eks-Karesidenan Surakarta

Eks-Karesidenan Surakarta	Indeks Pembangunan Manusia Eks-Karesidenan Surakarta		
	2020	2021	2022
Provinsi Jawa Tengah	71,87	72,16	72,79
Kabupaten Boyolali	74,25	74,40	74,97
Kabupaten Klaten	75,56	76,12	76,95
Kabupaten Sukoharjo	76,98	77,13	77,94
Kabupaten Wonogiri	70,25	70,49	71,04
Kabupaten Karanganyar	75,86	75,99	76,58
Kabupaten Sragen	73,95	74,08	74,65
Kota Surakarta	82,21	82,62	83,08

Sumber: Data Olahan Badan Pusat Statistik (2022)

Hal tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Wonogiri masih memiliki permasalahan yang cukup serius khususnya di bidang Pendidikan. Jika dilihat dari indikator melek huruf, Kabupaten Wonogiri memiliki tingkat melek huruf terendah, dengan sekitar 17,86% penduduknya buta huruf. Dalam hal melek huruf, angka melek huruf berkorelasi positif dengan waktu yang dihabiskan orang di sekolah.

Adanya permasalahan tersebut mendorong Pemerintah Kabupaten Wonogiri untuk lebih memperhatikan kualitas SDM di Wonogiri. Guna meningkatkan kualitas SDM di Kabupaten Wonogiri pemerintah sedang gencar melaksanakan Panca Program yang meliputi “Alus Dalane, Apik Pasare, Sehat Rakyat, Pinter Rakyat, dan Makmur Petanine”. Kelima program tersebut merupakan program unggulan Pemerintah Kabupaten Wonogiri yang mana salah satu fokusnya yaitu “Pinter Rakyat” yang artinya Pintar masyarakatnya. Untuk mewujudkan masyarakat yang berkualitas pemerintah Kabupaten Wonogiri mengalokasikan kurang lebih 20% dari keseluruhan APBD untuk bidang Pendidikan. Anggaran tersebut salah satunya digunakan untuk memberikan apresiasi bagi Mahasiswa yang memiliki prestasi di Kabupaten Wonogiri melalui Program Pemberian Penghargaan Bagi Pemuda Berprestasi Kabupaten Wonogiri. Program tersebut merupakan bentuk apresiasi kepada mahasiswa Kabupaten Wonogiri yang memiliki prestasi di berbagai bidang baik akademik atau non akademik, tujuannya untuk memotivasi para pemuda di Kabupaten Wonogiri agar lebih prestatif sehingga harapannya bisa meningkatkan angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Wonogiri.

Kebijakan pemberian penghargaan bagi pemuda berprestasi pertama kali diluncurkan pada tahun 2016 dimana pada tahun 2016-2021 nama program ini adalah “Beasiswa Mahasiswa Berprestasi Kabupaten Wonogiri” kemudian di tahun 2022 berubah nama menjadi “Penghargaan bagi pemuda berprestasi Kabupaten Wonogiri”. Pada 2 tahun pertama yakni tahun 2016 dan tahun 2017 kebijakan pemberian penghargaan bagi mahasiswa berprestasi ini diperuntukkan bagi mahasiswa dari keluarga kurang mampu. Kemudian ditahun 2018 sampai sekarang penghargaan ini ditujukan untuk seluruh mahasiswa Kabupaten Wonogiri yang berprestasi dan dinyatakan layak sesuai seleksi yang dilakukan. Jumlah alokasi anggaran yang dibutuhkan untuk implementasi kebijakan ini dapat dilihat pada tabel dibawah.

Tabel 1.2. Alokasi Anggaran dan Jumlah Penerima Penghargaan

Tahun	Jumlah Anggaran	Jumlah Penerima Penghargaan
2016	Rp2.000.000.000,00	166
2017	Rp2.500.000.000,00	136
2018	Rp2.162.535.000,00	162
2019	Rp5.820.000.000,00	461
2020	Rp7.504.000.000,00	600
2021	Rp7.503.999.972,00	615
2022	Rp7.503.999.710,00	618

Sumber: Data Sekunder yang diperoleh dari arsip Imapres Wonogiri (2023)

Realisasi anggaran pada tahun 2022 yakni sebanyak 618 penerima, dimana kuota penerimaan tersebut dibedakan menjadi beberapa kategori sebagaimana pada tabel berikut.

Tabel 1.3. Realisasi Anggaran Berdasarkan Kategori Penerimaan

Status	Kategori	Jenjang	Kuota	Rencana Kuota	Realisasi Kuota	Presentase diterima
Penerima Baru	Kategori 1	S-1	Paling tinggi 40%	247	242	39,16%
Penerima Baru	Kategori 2	D-4	Paling tinggi 7%	43	19	3,07%
Penerima Baru	Kategori 3	D-3	Paling tinggi 5%	31	20	3,24%
Penerima Baru	Kategori 4	S-1 Keagamaan	Paling tinggi 5%	31	12	1,94%
Penerima Baru	Kategori 5	S-2	Paling tinggi 3%	19	15	2,43%
Penerima Lanjutan	Kategori 6	S-1 D-4 D-3 S-1 Keagamaan S-2	Paling rendah 40%	247	310	50,16%
TOTAL			100%	618	618	100%

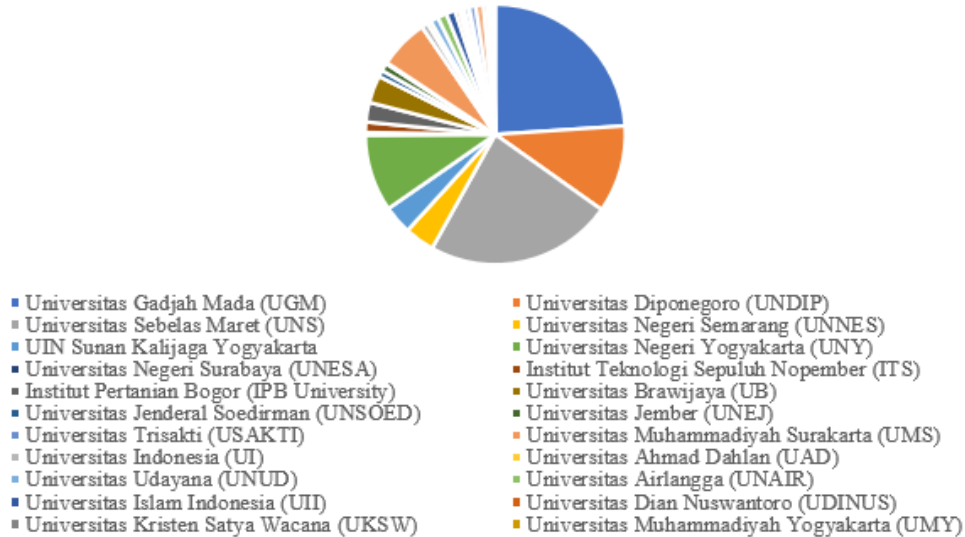
Sumber: Data Sekunder yang diperoleh dari arsip Imapres Wonogiri (2023)

Realisasi anggaran di tahun 2022 disalurkan kepada 618 penerima, dimana penerima penghargaan pemuda berprestasi ini dapat mengikuti seleksi melalui jalur pendaftaran sesuai dengan prestasi masing-masing peserta seleksi. Jalur Pendaftaran penghargaan ini dibagi menjadi tiga yakni jalur DTKS (Data Terpadu dan Kesejahteraan Sosial) yang dikhususkan untuk mahasiswa berprestasi dari

keluarga kurang mampu, Jalur Prestasi yang dikhususkan bagi mahasiswa yang mempunyai prestasi non akademik tingkat nasional maupun internasional, dan terakhir Jalur Reguler.

Penerima penghargaan pemuda berprestasi tersebut tersebar di 25 kecamatan se-Kabupaten Wonogiri. Dimana penerima penghargaan pemuda berprestasi terbanyak berada pada Kecamatan Wonogiri dengan jumlah penerima sebanyak 119, sedangkan kecamatan dengan jumlah penerima penghargaan pemuda berprestasi paling sedikit terletak pada kecamatan Paranggupito dengan jumlah penerima yakni 1 mahasiswa. Penghargaan ini diperuntukkan untuk berbagai jenjang Pendidikan baik S1, S2, D3, D4, maupun Profesi. Jenjang S1 menjadi jenjang dengan jumlah penerima paling banyak yakni sejumlah 535 penerima, sedangkan jenjang profesi menjadi jenjang dengan jumlah penerima paling sedikit yakni 1 penerima. Penerima penghargaan pemuda berprestasi ini tersebar di 33 perguruan tinggi negeri berakreditasi A di seluruh Indonesia. Perguruan tinggi dengan jumlah penerima penghargaan terbanyak berada pada Universitas Gadjah Mada (UGM), Universitas Diponegoro (UNDIP), dan Universitas Sebelas Maret (UNS). Persebaran penerima penghargaan pemuda berprestasi berdasarkan perguruan tingginya bisa disimak pada grafik dibawah.

**Grafik Persebaran Penerima Penghargaan Pemuda Berprestasi
Berdasarkan Perguruan Tinggi**



Sumber: Data Sekunder yang diolah kembali oleh Penulis (2023)

**Gambar 1.3. Grafik Persebaran Penerima Penghargaan Berdasarkan Perguruan
Tinggi**

Kebijakan pemberian penghargaan bagi pemuda berprestasi merupakan bagian dari RPJM Kabupaten Wonogiri dimana salah satu program yang menjadi program utama pada saat Bapak Joko Sutopo menjabat. Program ini tertuang dalam PERBUP Kabupaten Wonogiri No. 41 Tahun 2022 dan menyangkut pemberian penghargaan kepada generasi muda yang berprestasi. Sumber dana pemberian hibah studi berasal dari APBD Wonogiri setiap tahun. Saat penghargaan diberikan kepada para pemuda berprestasi, setiap siswa peraih penghargaan akan memperoleh beasiswa sebanyak Rp. 12.000.000,00 tiap tahun. Anggaran itu dapat dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan perkuliahan misalnya membayar uang kuliah tunggal (UKT), membayar buku penunjang kuliah, sewa kost dan lain-lain yang berhubungan dengan pembelajaran. Anggaran yang diberikan Pemkab Wonogiri

dapat dipertanggungjawabkan berupa laporan pertanggungjawaban yang ditulis oleh setiap penerima penghargaan dan dibuktikan menggunakan nota pembelian. Selain itu penerima penghargaan juga berkewajiban untuk berkontribusi terhadap pembangunan di Kabupaten Wonogiri dengan turut serta dalam melaksanakan program-program pemerintah. Namun, ada konflik peran pada saat implementasinya di tahun 2020. Keinginan pertama dari Pemkab Wonogiri adalah mahasiswa diharapkan dapat bekerja sama dalam mengatasi permasalahan kongkrit Wonogiri yang terkenal sebagai daerah gunung dan terjal, daerah rawan kemiskinan, kekeringan dan sulit memperoleh air bersih pada musim kemarau dan hanya bisa menghasilkan ubi kayu. Para penerima hibah setidaknya dapat berkontribusi untuk pembangunan Kabupaten Wonogiri dengan memberikan kontribusinya untuk mengatasi kemiskinan, memajukan pendidikan dan lainnya. Tapi dalam implementasinya penerima penghargaan justru kurang memberi masukan pada pemerintah dan mementingkan ego pribadi. Ego menyebabkan adanya pembatas antara satu mahasiswa dengan mahasiswa lainnya, atau antara mahasiswa di universitas tertentu dengan mahasiswa di universitas lain.

Kebijakan pemberian penghargaan bagi pemuda berprestasi ini tergolong inovasi baru yang belum pernah ditemui di daerah-daerah lain. Untuk itu dalam pelaksanaannya pun memerlukan peran serta dari berbagai stakeholders. Kebijakan ini dinilai berhasil meningkatkan kualitas SDM di Kabupaten Wonogiri, hal ini juga ditandai semakin banyaknya masyarakat yang terdorong untuk melanjutkan Pendidikan ke jenjang kuliah. Tentu saja dalam pelaksanaannya melibatkan banyak pihak, mengingat kebijakan ini merupakan inovasi baru yang diinisiasi oleh Bupati

Wonogiri. Adanya keterlibatan berbagai pihak inilah yang nantinya akan membentuk sebuah jejaring aktor. Implementasi kebijakan ini menjadi sorotan daerah lain. Oleh karena itu, berbagai daerah mengunjungi Kabupaten Wonogiri untuk meninjau bagaimana implementasi kebijakan penghargaan pemuda berprestasi Kabupaten Wonogiri.

Penerima penghargaan ini diharapkan mampu menjadi jembatan bagi Pemerintah Kabupaten Wonogiri untuk mengembangkan daerahnya. Namun dalam implementasinya para penerima penghargaan justru banyak yang tidak memberikan kontribusinya terhadap Pembangunan di Kabupaten Wonogiri, Hal ini dapat dilihat pada presentase jumlah mahasiswa yang aktif dan mahasiswa yang pasif dalam membantu mendukung Pembangunan di Kabupaten Wonogiri sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1.4. Presentase Mahasiswa Aktif dan mahasiswa pasif

No	Tahun	Jumlah Penerima	Presentase penerima yang pasif	Presentase penerima yang aktif
1	2020	600	50%	50%
2	2021	615	60%	40%
3	2022	618	53%	47%

Sumber: Data Primer yang diolah penulis (2023)

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa implementasi kebijakan penghargaan pemuda berprestasi masih terdapat banyak permasalahan. Banyaknya penerima penghargaan yang tidak memberikan kontribusinya sebagaimana tujuan dari adanya penghargaan ini disebabkan karena adanya beberapa aktor yang tidak berperan dengan baik saat proses seleksi penghargaan. Pada tahun 2020 kurang lebih terdapat 50% mahasiswa yang tidak berpartisipasi dalam kegiatan yang

diselenggarakan oleh Pemkab Wonogiri, artinya hampir setengah dari keseluruhan penerima penghargaan dikatakan pasif. Pada tahun 2021 terdapat 615 penerima penghargaan pemuda berprestasi, namun kurang lebih 60% dinyatakan tidak lolos dalam seleksi di tahun berikutnya. Dimana faktor yang menyebabkan para penerima tidak lolos salah satunya karena kurangnya kontribusi mereka yang dibuktikan dengan jumlah Poin Keaktifan yang didapat setiap mengikuti kegiatan. Sedangkan pada tahun 2022 setidaknya terdapat 53% mahasiswa penerima penghargaan yang dikatakan pasif.

Pada sistem kerjasama pihak ketiga menunjukkan koordinasi antar aktor masih dinilai buruk. Hal ini karena Dinas Pendidikan tidak meninjau keterlibatan pihak ketiga sebagai bagian dari proses seleksi. Hal ini menjadikannya sebagai faktor yang menyebabkan perekrutan kandidat penghargaan yang tidak akurat dan sistem penilaian yang kurang transparan. Selain itu, kerugian dari praktik ini adalah ketika penghargaan diterima, mahasiswa berhenti berpartisipasi dan dengan demikian merasa dibebaskan dari kewajibannya untuk berpartisipasi dalam kegiatan pemerintah (Nurhayati, 2022).

Hal tersebut juga terjadi pada sistem seleksi tahun 2021, dimana terdapat banyak aduan dari beberapa peserta seleksi penerimaan penghargaan. Hal ini diduga karena pada saat seleksi tahap wawancara beberapa panitia seleksi tidak menanyakan sesuai topik yang seharusnya dan cenderung bertanya perihal latar belakang keluarga dari calon penerima penghargaan.

Dari keseluruhan penerima penghargaan belum semua nya memberikan kontribusi terhadap pembangunan daerah Kabupaten Wonogiri. Kurangnya

partisipasi mahasiswa yang tergabung dalam komunitas Imapres Wonogiri (Ikatan Mahasiswa Berprestasi Kabupaten Wonogiri) juga disebabkan karena faktor personal dari penerima penghargaan. Penerima yang memiliki sifat *introvert* cenderung susah untuk bergaul dan enggan untuk mengikuti kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh OPD (Organisasi Perangkat Daerah) di Kabupaten Wonogiri, selain itu mahasiswa penerima penghargaan tidak memiliki rasa tanggungjawab sehingga setelah menerima penghargaan penerima tidak memberikan *feedback* berupa keikutsertaannya dalam mengikuti kegiatan yang diselenggarakan Pemkab Wonogiri. Hal ini menjadi salah satu penghambat dalam pelaksanaan kebijakan ini. Sehingga hal tersebut menyebabkan tujuan yang akan dicapai dalam penyelenggaraan kebijakan ini belum tercapai, yakni Meningkatnya kualitas SDM di Kabupaten Wonogiri.

Mengingat kompleksnya permasalahan terkait pendidikan khususnya dalam pelaksanaan kebijakan pemberian penghargaan untuk pemuda berprestasi di Kabupaten Wonogiri sebagai Langkah awal dalam meningkatkan kualitas SDM di Kabupaten Wonogiri, peneliti tertarik untuk menganalisis lebih lanjut tentang jejaring aktor dalam pelaksanaan kebijakan pemberian penghargaan untuk pemuda berprestasi Kabupaten Wonogiri. Hal tersebut disebabkan karena pentingnya peran Pendidikan dalam menjamin mutu Sumber daya manusia sebagai bekal bagi daerah untuk dapat mengembangkan daerahnya. Oleh karena itu penelitian ini penting untuk dilakukan dalam rangka mengetahui, mendeskripsikan, serta mengkaji lebih dalam mengenai permasalahan dalam pelaksanaan program pemberian

penghargaan untuk pemuda berprestasi di Kabupaten Wonogiri sebagai upaya meningkatkan mutu SDM di Kabupaten Wonogiri.

Penelitian ini mengambil lokus di Kabupaten Wonogiri karena Kabupaten Wonogiri merupakan daerah pertama yang menginisiasi adanya kebijakan pemberian penghargaan bagi pemuda berprestasi. Terlepas dari itu kebijakan ini cukup menarik banyak perhatian daerah lain untuk turut menerapkan kebijakan yang sama. Namun dalam pelaksanaannya ternyata masih menemui beberapa hambatan, untuk itu pertanyaan yang akan dijawab dalam penelitian adalah “Mengapa Jejaring Aktor Dalam Implementasi Kebijakan Pemberian Penghargaan Bagi Pemuda Berprestasi Kabupaten Wonogiri Belum Berjalan Optimal?”.

1.2.Rumusan Masalah

- 1) Siapa saja aktor yang terlibat dalam Implementasi Kebijakan Pemberian Penghargaan bagi Pemuda berprestasi di Kabupaten Wonogiri?
- 2) Bagaimana peran aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan pemberian penghargaan bagi pemuda berprestasi di Kabupaten Wonogiri?
- 3) Bagaimana hubungan antar aktor yang terjalin dalam implementasi Kebijakan pemberian penghargaan bagi pemuda berprestasi Kabupaten Wonogiri?
- 4) Bagaimana Model Jejaring aktor dalam implementasi kebijakan pemberian penghargaan bagi pemuda berprestasi di Kabupaten Wonogiri?

1.3. Tujuan Penelitian

- 1) Mengidentifikasi siapa saja aktor yang terlibat dalam Implementasi Kebijakan Pemberian Penghargaan bagi Pemuda berprestasi di Kabupaten Wonogiri.
- 2) Menganalisis peran aktor yang terlibat dalam implementasi Kebijakan Pemberian Penghargaan bagi Pemuda berprestasi di Kabupaten Wonogiri.
- 3) Menganalisis hubungan antar aktor yang terjalin dalam implementasi Kebijakan pemberian penghargaan bagi pemuda berprestasi Kabupaten Wonogiri?
- 4) Menggambarkan model jejaring aktor dalam implementasi Kebijakan Pemberian Penghargaan bagi Pemuda berprestasi di Kabupaten Wonogiri

1.4. Kegunaan Penelitian

1.4.1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memperkaya ilmu pengetahuan dan wawasan mengenai teori-teori kebijakan publik terutama terkait Jejaring aktor dalam implementasi kebijakan pemberian penghargaan bagi pemuda berprestasi di Kabupaten Wonogiri.

1.4.2. Kegunaan Praktis

1.4.2.1. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan pengetahuan, wawasan, dan skill peneliti dalam meneliti tentang Jejaring aktor dalam implementasi kebijakan pemberian penghargaan bagi pemuda berprestasi di Kabupaten Wonogiri.

1.4.2.2. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan bahan pertimbangan untuk memperkuat jaringan aktor dalam implementasi kebijakan pemberian penghargaan bagi pemuda berprestasi di Kabupaten Wonogiri.

1.4.2.3. Bagi Universitas

Hasil penelitian ini di harapkan mampu meningkatkan kepustakaan dan dijadikan bahan rujukan bagi penelitian selanjutnya yang relevan dengan jaringan aktor dalam implementasi kebijakan pemberian penghargaan bagi pemuda berprestasi di Kabupaten Wonogiri.

1.5. Kajian Teori

1.5.1. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan topik penelitian yang diambil peneliti dalam tulisan ini, maka peneliti menggunakan berbagai penelitian terdahulu untuk menambah teori dan materi dalam tulisan ini. Pada penelitian sebelumnya, peneliti tidak menemukan penelitian yang sama dengan judul penelitian yang akan dilakukan peneliti. Di bawah ini tercantum beberapa jurnal penelitian yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti.

Penelitian pertama oleh Ita Pujiastuti, dkk pada tahun 2022 dengan judul Jaringan Aktor dalam Program Percepatan Pendaftaran Tanah di Badan Pertanahan Nasional Kota Semarang. Penelitian ini memiliki tujuan untuk melakukan identifikasi dan analisis mengenai peranan aktor dan model jejaring aktor dalam percepatan sistem lengkap program pendaftaran

real estat di kota Semarang. Penelitian dalam artikel ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dimana instrumen kuncinya adalah peneliti (peneliti adalah informan utama). Artikel ini memperlihatkan Kantor Pertanahan Kota Semarang merupakan aktor kunci yang berperan sebagai juru bicara, fasilitator dan koordinator implementasi kebijakan. Kajian ini mengkaji perkembangan kebijakan percepatan pendaftaran tanah di Indonesia ditinjau dari hubungan jaringan antar aktor yang mempengaruhi kebijakan di daerah tersebut.

Penelitian kedua dilakukan oleh Dwi Nurhayati, dkk pada tahun 2022 dengan judul Peran Aktor Kebijakan dalam Implementasi Program Beasiswa Mahasiswa Berprestasi Kabupaten Wonogiri Tahun 2020. Tujuan penelitian ini yaitu menganalisis aspek peran aktor politik melalui teori peran aktor dalam implementasi Eden & Ackerman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran aktor politik yang terlibat dalam pelaksanaan program beasiswa mahasiswa berprestasi di Kabupaten Wonogiri dapat diklasifikasikan berdasarkan kepentingan dan seberapa berpengaruh. Aktor kebijakan tersebut antara lain Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Wonogiri, penerima aktif Beasiswa Mahasiswa Berprestasi Kabupaten Wonogiri (IMAPRES), Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wonogiri, dan penerima pasif Program Beasiswa Mahasiswa Berprestasi Kabupaten Wonogiri. Penerima hibah pasif bertanggung jawab untuk berpartisipasi dalam berbagai kegiatan IMAPRES untuk melaksanakan peran dalam berkontribusi terhadap pemerintah.

Penelitian ketiga dilakukan oleh Veronica Lopez, dkk pada tahun 2021 dengan judul “*A struggle for translation: An aktor-network analysis of Chilean school violence and school climate policies*”. Penelitian dalam artikel ini memiliki tujuan untuk melakukan analisis jaringan aktor pada kekerasan sekolah Chili dan kebijakan iklim sekolah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tiga aktor yang terlibat yakni Badan Pendidikan, MINEDUC, dan Pengawas. Peran Dewan Pendidikan Nasional adalah kunci dalam mengimplemnetasikan kebijakan iklim sekolah. Dalam istilah ANT, CNED bertindak sebagai aktor yang tepat waktu (Munro, 2004). Berlakunya kekerasan sekolah / iklim sekolah saat ini realitas terikat erat dengan logika performatif akuntabilitas berdasarkan pendekatan NPM. Penelitian ini juga menyimpulkan bahwa gerakan implementasi kebijakan tidak hanya berlaku untuk kasus Chili, tetapi mungkin juga dapat ditransfer ke negara dan wilayah lain yang secara progresif memberlakukan akuntabilitas sebagai mekanisme dari reformasi Pendidikan.

Penelitian keempat dilakukan oleh Kadia Georges Aka pada tahun 2019 dengan judul “*Aktor-network theory to understand, track and succeed in a sustainable innovation development process*”. Penelitian ini bertujuan untuk Menganaisis jejaring aktor dalam Proses pengembangan inovasi berkelanjutan. Metode yang dipakai untuk menyusun penelitian ini yakni kualitatif. Penelitian yang ditulis oleh Kadia. G.A menunjukkan bahwa teori dan metode ANT digunakan dalam menganalisis keterkaitan antar dimensi dalam mengembangkan inovasi berkelanjutan. Dapat memberikan

gambaran proses dan faktor-faktor yang berpengaruh pada waktu, keadaan dan praktik manajemen.

Penelitian kelima dilakukan oleh Genta Paradise Purba, dkk pada tahun 2021 dengan judul Model Jaringan Aktor Dalam Pengembangan Pariwisata Desa Wisata Wonolopo Kecamatan Mijen Kota Semarang. Tujuan dari penelitian dalam artikel ini adalah melakukan identifikasi aktor, peran aktor, dan mendeskripsikan model jejaring aktor yang terlihat dalam program kebijakan pengembangan pariwisata Desa Wisata Wonolopo. Metode yang dipakai dalam penelitian adalah metode deskriptif kualitatif dengan menggunakan metode pengumpulan data wawancara langsung/online, observasi serta dokumentasi. Penelitian dalam tulisan ini menyatakan bahwa DISBUDPAR Kota Semarang merupakan aktor utama, berperan menjadi pembuat kebijakan, fasilitator dan koordinator. Pelaku utamanya yakni POKDARWIS, RW dan Komunitas Aktif sebagai pelaksana dan akselerator. Aktor sekunder termasuk media dan akademisi, yang bertindak menjadi akselerator. Pelaku tingkat ketiga adalah kecamatan, kecamatan serta PKK memiliki peran sebagai akselerator. Aktor kuarter adalah komunitas pasif yang bertindak sebagai kelompok yang menjadi sasaran serta penerima manfaat. Model jaringan aktor yang terbentuk adalah model quadruple helix (pemerintah, peneliti, masyarakat serta media massa). Penelitian keenam yakni oleh Rezki Feni Oktaviana pada tahun 2021 dengan judul Analisis Jejaring Aktor Dalam Program Kampung Iklim Kelurahan Bukit Cermin Kota Tanjungpinang. Tujuan dari

penelitian ini adalah menggambarkan peran para aktor yang berpartisipasi pada program desa iklim terutama di Proklam Anggrek RW 06 Kelurahan Bukit Cermin Kota Tanjungpinang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam interaksi ini keberhasilan implementasi jaringan aktor di Anggrek Proklam RW 06 Kelurahan Bukit Cermin dicapai setelah terwujudnya jejaring aktor yang tetap selama empat tahap translasi: Momen situasi masalah, momen kepentingan, momen pendaftaran, momen mobilisasi para aktor.

Penelitian ketujuh dilakukan oleh Jacko Ryan pada tahun 2020 dengan judul penelitian Peranan Jaringan Aktor Dalam Kebijakan Penanganan Covid-19 Di Indonesia. Penelitian dalam tulisan ini memiliki tujuan untuk memberikan analisis tentang peran jaringan aktor dalam menangani kebijakan pandemi Covid-19. Hasil kajian ini menunjukkan bahwa jejaring aktor pemerintah dan non pemerintah serta antara pemerintah dan LSM belum dapat dimanfaatkan secara maksimal. Hal ini berpengaruh pada berbagai lembaga dalam pemerintahan dan hubungan antara pemerintah negara bagian dan daerah menjadi kacau dan terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaan tugasnya. Pada akhirnya dampak ini akan dirasakan langsung oleh masyarakat yang kebingungan, keluhan dan cemas akan Covid-19.

Penelitian kedelapan dilakukan oleh Ibnu Hermawan pada tahun 2019 dengan judul Jaringan Antar Aktor Dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus di Desa Lengkong Kecamatan Rakit Kabupaten

Banjarnegara). Tujuan dari penelitian dalam artikel ini adalah untuk mengidentifikasi aktor dan jaringan aktor dalam pengelolaan Dana Desa Lengkong Kecamatan Rakit Kabupaten Banjarnegara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan Dana Desa Lengkong dipengaruhi oleh para pelaku atau menguasai para pelaku dan terjemahannya, dalam hal ini DISPERMADES Kabupaten Banjarnegara, lembaga KPMD, lembaga BPD dan lembaga BUMDES yang bertindak sebagai penerjemah atau bertindak sebagai koneksi dalam jaringan yang membantu mengelola dana desa. .

Penelitian kesembilan dilakukan oleh Ramaditya Rahardian, dkk (2021) dengan judul Jejaring Aktor dalam Upaya Perubahan Kebijakan: Kasus Advokasi Kebijakan dalam Menolak Izin Lingkungan Pengolahan Limbah Berbahaya dan Beracun. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis peran gerakan perempuan Lakardovo Mandiri dalam memanfaatkan sumber daya web yang ada untuk menentang kebijakan izin lingkungan Pemerintah Kabupaten Mojokerto untuk penggunaan bahan berbahaya dan beracun oleh sektor publik. Putra Bunda Suci Abad di desa Lakardovo, Kecamatan Jetis, Kabupaten Mojokerto. Hasil studi ini menunjukkan bahwa Jaringan Advokasi Kebijakan berdampak pada perjuangan akar rumput untuk membawa perubahan kebijakan. Peran para aktor yang terlibat dalam jaringan pengaruh ini menunjukkan bahwa para aktor berkepentingan untuk menolak izin lingkungan pembuatan batu bata PT. Putra-putra Restu Ibu Abad yang tinggal di desa Lakardovo mampu memenuhi kewajibannya sesuai kontrak dan sumber daya.

1.5.2. Administrasi Publik

Dalam perkembangan administrasi Negara mencakup aspek-aspek esensial, yaitu penyelenggaraan negara memiliki pemahaman terkait bagaimana suatu lembaga pemerintah tumbuh dan hidup untuk melaksanakan tugasnya. Seperti yang diwakili oleh Warella, Y. (1997), administrasi publik telah mengalami berbagai pasang surut dalam sejarah perkembangannya selama kurang lebih seratus tahun. Konsep dan teorinya terus berkembang. Salah satu misi utamanya sebagai “*the guardian of public interes*” dan melayani secara prima kepada masyarakat serta sudah menjadi keinginan yang selalu ingin dicapai. Cakrawala administrasi negara harus diperluas, perspektifnya diperluas untuk memahami realitas saat ini. Selain memperluas wawasan dan perspektif, pemerintah harus tetap setia pada tanggung jawab intinya yaitu administrasi, membangun dan menegakkan hukum, melaksanakan pembangunan dan melayani secara prima kepada masyarakat. Pendapat Nicholas Henry (1988) ini masih bisa dijadikan acuan bagi upaya mencari perkembangan paradigma keilmuan pada penelitian administrasi publik. Henry mengklasifikasikan paradigma tersebut menurut fokus serta tempat perkembangannya. Fokusnya adalah mempertanyakan metode-metode dasar atau cara-cara penyelesaian masalah-masalah ilmiah, dengan pokok bahasan meliputi bidang spesialis atau bidang-bidang terkait. Pemerintahan bukanlah ilmu yang mempunyai definisi dan sifat general serta mandiri, melainkan ilmu yang tidak dilaksanakan dalam negara multidisiplin, atau dengan kata lain: pemerintah

pada hakikatnya adalah cabang pemerintahan yang berfokus pada wacana di bidang pemerintahan. tata kelola atau penyampaian layanan.

Berdasarkan beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa Administrasi Publik merupakan sebuah studi yang memiliki dua fokus utama yaitu manajemen publik dan kebijakan publik. Administrasi public juga dapat didefinisikan sebagai sebuah studi yang mempelajari tentang bagaimana pemerintah memberikan pelayanan yang baik kepada publik.

1.5.3. Paradigma Administrasi Publik

Evolusi Paradigma Keilmuan Administrasi Publik berbagai pendapat dari Nicholas Henry (1988) masih bisa dijadikan acuan dalam upaya menelusuri evolusi paradigma keilmuan dalam penelitian administrasi publik. Henry mengklasifikasikan paradigma ini menurut fokus dan tempat perkembangannya. Secara ringkas menurut Henry, perkembangan penelitian ilmu manajemen dapat dibagi menjadi lima paradigma, yaitu: a) Paradigma pertama, Dikotomi politik dan administrasi (1990-1926); b) Paradigma dua: Prinsip Administrasi (1927-1937); c) Paradigma tiga: Manajemen sebagai Ilmu Politik (1950-1970); d) Empat paradigma administrasi negara sebagai ilmu administrasi (1956-1970); e) Paradigma administrasi negara lima sebagai administrasi negara (1970-dst).

Dalam paradigma ini ilmu administrasi negara sudah menjadi administrasi negara menemukan tempatnya dalam organisasi publik yang mengejar tujuan berbeda dari organisasi korporasi. Perkembangan ilmu administrasi publik berkaitan dengan hubungan administrasi diantara

organisasi publik dan swasta, hubungan antara teknologi dan masyarakat. Tentu saja keadaan ini memperkuat perkembangan tempat penyelenggaraan negara melalui pemanfaatan ilmu ekonomi organisasi dalam ilmu ketatanegaraan. Sehingga perkembangan kebutuhan dan konsepnya tidak tergambarkan dengan jelas

Masalah yang dihadapi oleh ahli teori di berbagai negara menjadi lebih kompleks, mereka memajukan ilmu administrasi publik, dan teori serta pendekatan yang diduga tepat pada waktu dan tempat tertentu untuk memecahkan masalah, dianggap tidak memadai pada waktu dan tempat yang berbeda. Politik membuat kebijakan dan manajemen mengimplementasikan kebijakan. Pelayanan pemerintah menitikberatkan pada pemberian pelayanan secara langsung oleh instansi pemerintah atau instansi pemerintah yang berwenang.

Dimasa *New Public Management* (NPM), Tujuannya adalah untuk mempermudah dan menyederhanakan administrasi dan organisasi yang kompleks. Isu saat ini adalah bagaimana menerapkan kepemimpinan sektor swasta untuk membuat sektor publik lebih efektif. Pelayanan publik menggunakan mekanisme pasar dengan cara yang lebih berorientasi pada pelanggan (sebagai pelanggan) yaitu puas. Selanjutnya adalah *The New Public Service* (NPS). Paradigma ini dikemukakan Denhardt dan Denhardt. Ia mengatakan bahwa periode ini pada dasarnya tidak sama dengan periode NPM. Menurut NPS, pemerintahan tidak boleh dijalankan seperti korporasi, tetapi seperti demokrasi.

Kegiatan pemerintah meliputi kegiatan pelayanan, harus didasarkan pada prinsip-prinsip demokrasi. Saat itu, karyawan tidak disebut "pelanggan", melainkan "warga negara". Sebagai warga negara, masyarakat berhak menerima manfaat sebagaimana warga negara lain. Dalam menyelenggarakan pelayanan publik, harus terdapat kerjasama diantara negara dan masyarakat pengguna layanan. Pada dasarnya, NPM dan NPS merupakan konsensus hasil pemikiran, yaitu semacam perubahan kecepatan pengetahuan yang ada dari orang-orang yang peduli terhadap suatu isu krisis disaat yang sama. Oleh karena itu, diperlukan birokrat yang dapat menerapkan dengan baik berbagai prinsip paradigma tersebut. Implementasi yang dilakukan oleh birokrat tidak lagi bertujuan untuk mengumpulkan program atau keuangan, namun untuk mencapai hasil yang lebih optimal. Komitmen dan niat dalam mencapai hasil yang lebih optimal harus dinyatakan secara jelas dan menjadi ukuran utama keberhasilan birokrasi negara (Keban, 2008:256).

Paradigma administrasi negara selaku ilmu politik. Fokus utama paradigma ilmu politik administrasi public (1950-1970) merupakan kembalinya eksistensi administrasi publik selaku bagian dari ilmu politik, karena administrasi publik merupakan pelayanan kekuasaan serta mempunyai kekuasaan penuh guna melaksanakan pelayanannya dalam menunjang ketentuan kekuasaan secara lebih efisien. Tempat administrasi publik pula jelas, yakni area birokrasi negara. Paradigma administrasi negara selaku ilmu administrasi.

Dalam paradigma administrasi publik sebagai ilmu administrasi (1956-1970), konsentrasi adalah kuncinya, sedangkan lokasi bukanlah syarat. Dengan prinsip ini, ilmu manajemen teknik dan teori organisasi dikembangkan sebagai bagian dari ilmu administrasi publik, yang seringkali membutuhkan keahlian dan spesialisasi. Tetapi di mana dan di institusi mana teknik-teknik ini harus diterapkan bukanlah perumusan keprihatinan paradigmatis.

Paradigma administrasi negara sebagai ilmu administrasi negara. Paradigma administrasi publik seperti ilmu administrasi publik (1970) merupakan pembaharuan dari paradigma sebelumnya. Dalam konteks ini, manajemen tidak terbatas pada bidang manajemen saja, tetapi mulai mendalami teori organisasi. Fokus manajerial juga berkembang menjadi teori manajemen, yang lebih berfokus pada bagaimana organisasi harus beroperasi, bagaimana orang berperilaku dan bagaimana keputusan dibuat. Dalam paradigma ini, administrasi publik kemudian terutama diorientasikan pada teori dan teknik administrasi, administrasi modern, ekonomi politik dan proses penciptaan, analisis dan pengukuran hasil kebijakan publik.

Paradigma terakhir ialah Governance yang merupakan paradigma baru dalam tatanan pengelolaan pemerintahan. Ada 3 pilar governance, yakni pemerintah, pihak swasta, serta masyarakat. Sedangkan itu, paradigma pengelolaan pemerintahan yang lebih dahulu tumbuh merupakan *government* selaku salah satunya penyelenggara pemerintahan. Dengan bergesernya paradigma dari *government* ke arah *governance*, yang

menekankan pada kerja sama dalam kesetaraan serta penyeimbang antara pemerintah, pihak swasta, serta masyarakat madani (*civil society*) hingga dibesarkan pemikiran ataupun paradigma baru administrasi publik yang diucap dengan pemerintahan yang baik(*good governance*).

Penelitian yang akan dilakukan penulis dengan topik “Jejaring Aktor dalam Implementasi Kebijakan Pemberian Penghargaan bagi Pemuda Berprestasi Kabupaten Wonogiri” merupakan paradigma ke-enam yaitu *Governance*. Hal ini disebabkan karena dalam implementasi sebuah kebijakan membutuhkan adanya kolaborasi dan intervensi dari berbagai pihak atau *stakeholder*. Adanya bentuk kolaborasi ini merupakan perwujudan dari paradigma *Governance*.

1.5.4. Kebijakan Publik

Kebijakan (*policy*) seringkali mengacu pada perilaku satu atau beberapa aktor (pejabat pemerintah atau kelompok/instansi pemerintah) dalam melaksanakan suatu kegiatan atau program tertentu. Dye (2017:1) memberikan pengertian kebijakan publik sebagai keputusan apakah pemerintah memutuskan untuk melakukan sesuatu atau tidak. Kemudian Anderson (1997:3) mengartikan kebijakan publik sebagai seperangkat tindakan yang mempunyai tujuan dan diikuti oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku dalam menghadapi suatu masalah atau kepentingan. Kebijakan publik adalah apa yang dilakukan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan warganya.

Kebijakan publik merupakan serangkaian tindakan atau perilaku yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah, baik dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang, untuk mencapai suatu tujuan tertentu berdasarkan kepentingan masyarakat. Dalam merumuskan sebuah kebijakan diperlukan sebuah proses yang Panjang sehingga tercipta sebuah kebijakan yang baik. Proses kebijakan terdiri dari serangkaian tahap yang terdiri dari penyusunan agenda kebijakan, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan, dan evaluasi kebijakan.

1.5.5. Proses Kebijakan Publik

Dalam proses pembuatan kebijakan yang terdapat rangkaian tahap yang meliputi:

- 1) Penyusunan agenda kebijakan, Pada tahap ini ada formulasi masalah guna mencari pengetahuan yang relevan dengan kebijakan terhadap definisi permasalahan proses pembuatan kebijakan. Formulasi tersebut menciptakan asumsi yang tersembunyi, mendiagnosis penyebab-penyebab, memetakan tujuan, memadukan pandangan yang berlawanan, serta merancang peluang- peluang kebijakan baru.
- 2) Perumusan kebijakan, tahap ini membutuhkan uraian yang bisa menyediakan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan tentang permasalahan yang terjaln di masa mendatang selaku aksi alternatif. Peramalan masa depan yang potensial, secara normatif bernilai, mengidentifikasi kendala- kendala yang bisa terjaln dalam

pencapaian tujuan, serta mengestimasi kelayakan politik dari bermacam opsi (Sujianto, 2008: 38).

- 3) Adopsi kebijakan, dalam tahap ini melakukan rekomendasi terhadap alternatif yang akan dipilih melalui pendekatan pengetahuan yang relevan dengan prinsip-prinsip kebijakan. Rekomendasi membantu estimasi tingkat rasional dan ketidakpastian, mengenali eksternalisasi dan akibat ganda, menentukan kriteria dalam pembuatan keputusan pilihan, dan menentukan pertanggungjawaban administratif bagi implementasi kebijakan.
- 4) Implementasi kebijakan, pada tahap ini pengambilan kebijakan berusaha melakukan pemantauan (*monitoring*) tentang akibat dari kebijakan yang diambil sebelumnya atas dasar pengetahuan yang relevan dengan konsep-konsep tersebut. Pemantauan membantu menilai tingkat kepatuhan, menemukan akibat-akibat yang tidak diinginkan dari kebijakan dan program, mengidentifikasi hambatan dan rintangan implementasi, dan menemukan letak-letak pihak yang bertanggung jawab pada setiap tahap kebijakan.
- 5) Evaluasi kebijakan, di bagian evaluasi membutuhkan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan terhadap ketidaksesuaian antara kinerja kebijakan yang diharapkan dengan yang benar-benar dihasilkan. Tujuan ini membantu pengambil kebijakan pada tahap penilaian kebijakan terhadap proses pembuatan kebijakan,

menyumbangkan klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari kebijakan, membantu dalam penyesuaian masalah.

Jadi dapat disimpulkan bahwa dalam proses kebijakan terdapat lima tahapan didalamnya yakni penyusunan agenda kebijakan, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan dan evaluasi kebijakan.

1.5.6. Implementasi

Implementasi bisa didefinisikan pelaksanaan atau penerapan. Browne dan Wildavsky (Usman, 2004:7) berpendapat "implementasi merupakan kelanjutan dari kegiatan yang saling menyesuaikan". Menurut Syauman et al. (2004:295) Implementasi yaitu serangkaian program yang memiliki tujuan mengkomunikasikan kebijakan dengan publik supaya kebijakan itu mampu mencapai tujuan yang diinginkan. Rangkaian kegiatan awalnya meliputi persiapan perintah tindak lanjut, yang merupakan interpretasi pedoman. Kedua, mempersiapkan sumber daya guna mengarahkan kekuatan dalam implementasi, termasuk fasilitas sarana dan prasarana, anggaran, dan menentukan siapa yang bertanggung jawab dalam implementasi kebijakan tersebut. Ketiga, memberikan pedoman nyata bagi masyarakat.

Berdasarkan perspektif ini, dapat dilihat bahwa sebuah implementasi kebijakan pada dasarnya tidak selalu mengenai perilaku badan pengatur yang bertanggungjawab atas implementasi suatu kegiatan dan kepatuhan pada kelompok tertentu, namun juga mengenai jaringan

kekuatan politik, ekonomi, dan sosial yang secara langsung atau tidak berpengaruh pada perilaku seluruh pihak dan membuat pedoman agar tujuan kebijakan publik dapat diimplementasikan lewat kegiatan pemerintah.

Sedangkan Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier dalam Wahab (2005:65) mengemukakan pentingnya implementasi melalui pernyataan bahwa mengerti apa yang sebenarnya terjadi setelah suatu program dikatakan efektif atau ditetapkan adalah penting untuk mengimplementasikan kebijakan manajemen atau menghasilkan efek/dampak nyata pada masyarakat atau peristiwa.

Pada proses kebijakan, implementasi yaitu sebuah pelaksanaan di lapangan. Pada tahap ini, suatu kebijakan perlu dilakukan berdasarkan peraturan yang sudah ditentukan supaya apa yang menjadi fokus kebijakan bisa dicapai sesuai harapan. David C. Korten (1988) (Tarigan, 2008), mengungkapkan bahwa konsep dengan menggunakan pendekatan proses pembelajaran yang disebut Model Kesesuaian Implementasi, konsep itu memiliki tiga aspek, yakni kebijakan itu sendiri, orang yang melaksanakan kebijakan dan kelompok yang menjadi sasaran (Karmanis dan Karjono, 2020).

Berdasarkan model Korten, kebijakan dianggap tidak berhasil dan tidak memenuhi harapan jika implementasi kebijakan tidak memenuhi tiga unsur kepatuhan. Karena jika output/hasil dari kebijakan tersebut tidak memenuhi persyaratan yang diperlukan oleh masyarakat, oleh karenanya output/hasil tersebut tidak bisa digunakan. Jika pelaksana tidak dapat

menyelesaikan tugas sesuai ketentuan polis, pelaksana juga tidak dapat mentransfer laba/penerimaan ke polis secara memadai. Jika kelompok sasaran tidak dapat memenuhi syarat yang ditetapkan oleh pelaksana program, maka keluaran/outcome tidak dapat dihasilkan. Oleh karena itu, ada tiga faktor kesesuaian yang penting dalam pelaksanaan kebijakan supaya program dapat terlaksana seperti harapan (Tarigan, 2008).

Implementasi merupakan pelaksanaan sebuah kebijakan sesuai dengan rencana sehingga dapat terwujud sebuah program sesuai tujuan dan harapan. Dalam implementasi sebuah kebijakan tentu diperlukan adanya peran serta dari berbagai aktor, dimana hubungan antar aktor tersebut nantinya akan membentuk sebuah jaringan aktor.

1.5.7. Jejaring Aktor

Definisi jaringan aktor yakni, menunjukkan bahwa merepresentasikan jaringan, yang sebenarnya belum pasti demikian. Kedua, ini bukan hubungan apriori, tanpa keterkaitan dengan asumsi yang ada dari atas (elit) atau di bawah (masyarakat), dan tidak terkait dengan asumsi makro atau mikro yang sedang berkembang. Teori jaringan aktor mencoba menjelaskan bagaimana asal-usul materi semiotik terkait dengan fungsi secara keseluruhan. serangkaian aktor yang terlibat dalam penciptaan makna (baik material maupun semiotik).

Teori jaringan aktor atau *Aktor Network Theory* (ANT) dikenalkan oleh Michel Callon, Bruno Latour, dan John Law di tahun 1980-an. Teori ini berasal dari disiplin yang berurusan dengan objek yang merupakan

bagian dari jaringan sosial. Teori ini berurusan dengan keterkaitan yang muncul antara berbagai jenis entitas, baik material maupun manusia, dan kemudian membentuk realitas, misalnya, sebuah organisasi. Setiap entitas yang terlibat dalam jaringan yang didirikan disebut di bawah ini sebagai "aktor". Yuniningsih (2018)

Callon dan Latour (1981) dalam (Yuniningsih, 2018: 67) menyatakan bahwa aktor jaringan dapat terbentuk jika ada kesepakatan antara aktor yang terlibat. Kesepakatan ini muncul ketika kepentingan masing-masing aktor dapat digabungkan dengan tugas lain, mengidentifikasi kekuatan dengan mengumpulkan sumber daya yang ada serta disetujui oleh aktor primer untuk tugas baru yang akan dilakukan pada implementasi atau mengembangkan program yang akan dilakukan.

Teori tersebut kemudian dikembangkan oleh etzkowitz (1995) yang memberikan klasifikasi jaringan aktor berdasarkan jumlah aktor yang terlibat. Sebuah jaringan aktor dapat terbentuk berdasarkan jumlah aktor yang terlibat didalamnya, atau dikenal dengan konsep helix. Konsep helix terbagi menjadi beberapa jenis sesuai dengan jumlah pelakunya diantaranya:

- 1) Konsep *Helix* pertama adalah *Triple Helix*, sebuah kolaborasi antara tiga aktor, pemerintah, industri dan akademisi. *Triple Helix* merupakan alternatif untuk mengembangkan kreativitas dalam inovasi serta teknologi bagi industri kreatif (Dewi, 2009), juga didefinisikan sebagai elemen untuk mengenalkan prosedur dan

praktek inovasi dalam pertumbuhan UKM. Yawson (2009) menyadari bahwa negara, universitas dan industri dalam sistem *Triple Helix* (TH) kekurangan sebuah heliks keempat yang penting, yaitu. masyarakat, untuk itulah model inovasi *Quadruple Helix* (QH) lahir dalam perkembangannya. Konsep QH merupakan pengembangan TH dengan beberapa pihak, misalnya peneliti dan wirausaha (Rebernik, 2009); masyarakat sipil (Caranyannis & Campbell, 2012), pemerintah dan pihak keempat adalah masyarakat.

- 2) Konsep *Quadruple Helix* merupakan evolusi dari *Triple Helix* dengan memberdayakan masyarakat sipil dan menggabungkan inovasi dan pengetahuan (Oscar, 2010). Empat heliks mendekatkan para aktor dan membawa diskusi ke pemangku kepentingan tingkat terendah. Namun, dimensi keempat, yaitu. pengguna, diperlakukan lebih sebagai konsumen daripada sebagai mitra sejati untuk membantu membentuk inovasi
- 3) Konsep *Pentahelix* yaitu kolaborasi dari lima (lima) kelompok kepentingan yang terdiri dari pemerintah, akademisi, bisnis, masyarakat sipil dan media. Konsep ini diharapkan dapat mengimplementasikan kebijakan yang didukung oleh banyak sumber daya yang saling berinteraksi secara sinergis.

Berdasarkan beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa Jaringan aktor merupakan hubungan atau keterkaitan antar aktor yang terlibat dalam implementasi suatu program, dimana hubungan antar

aktor tersebut akan membentuk pola jaringan atau model jaringan. Model jaringan aktor dibedakan menjadi *triple helix*, *quadruple helix*, dan *pentahelix*. Sebelum menentukan model jaringan aktor, perlu adanya identifikasi aktor untuk memetakan aktor-aktor yang terlibat dalam implementasi sebuah kebijakan.

Dalam menentukan derajat hubungan antar aktor dalam konsep *helix* maka diperlukan adanya identifikasi interaksi yang terjadi antara aktor-aktor tersebut. Ada beberapa jenis interaksi yang umum terjadi dalam konteks kebijakan, antara lain:

- 1) Kolaborasi: Aktor-aktor bekerja bersama untuk mencapai tujuan yang sama.
- 2) Persaingan: Aktor-aktor bersaing satu sama lain untuk mencapai tujuan yang bertentangan.
- 3) Konflik: Aktor-aktor memiliki konflik yang serius dan bertentangan satu sama lain dalam mencapai tujuan mereka.
- 4) Ketergantungan: Aktor-aktor saling tergantung satu sama lain dalam mencapai tujuan mereka.
- 5) Dominasi: Salah satu aktor memiliki kekuatan atau pengaruh yang signifikan terhadap aktor lain.

1.5.8. Identifikasi Aktor

Aktor adalah seseorang, sekelompok orang atau lembaga tertentu yang memiliki kepentingan dan mempengaruhi proses pengambilan keputusan program. Aktor pada awalnya diidentikkan dengan istilah

“*stakeholder*” yang digunakan dalam dunia bisnis (ekonomi), namun dengan berkembangnya birokratis *entrepreneurship* negara, istilah “*stakeholder*” mulai mendapat penerimaan dalam dunia administrasi publik. telah melakukan banyak teori kehidupan bisnis lainnya.

Stakeholder atau aktor awalnya adalah istilah yang menunjukkan seseorang yang memiliki uang atau aset lain yang memiliki pengaruh besar. Stakeholder memiliki definisi yang berbeda-beda, namun pada dasarnya mencakup pengertian sebagai *stakeholder* ((Brenner dan Cochran, 1991; Clarkson, 1995; Donaldson dan Preston, 1995), disusul kemudian Freeman (1994) memperkenalkan konsep manajemen *stakeholder*; dalam (Suwitri, 2008: 68)).

Identifikasi aktor dilakukan untuk melihat bagaimana keterlibatan atau peran aktor dalam setiap tahap pelaksanaan suatu program. Blackman (2003) dalam modul *Project Cycle Management*, menjelaskan bahwa mengidentifikasi aktor yang terlibat diawali dengan menentukan tingkat kepentingan aktor. Pemeran dibagi menjadi dua bagian, yaitu pemeran utama dan pemeran pendukung. Pelaku utama adalah sekelompok orang atau lembaga yang keberadaannya diuntungkan atau bergantung pada sumber daya, jasa atau sektor yang terlibat dalam pelaksanaan program. Mereka memiliki keterbatasan dalam memilih perubahan program, sehingga cukup sulit untuk menyesuaikannya. Aktor sekunder adalah sekelompok orang atau lembaga yang memiliki kepentingan terhadap pelaksanaan program dan keberadaan aktor tersebut diperhitungkan.

Menurut Howlett dan Ramesh (1995) dalam Tri Yuniningsih (2018) menyatakan bahwa aktor-aktor dalam proses kebijakan berasal dari individu dan kelompok. Aktor-aktor yang terlibat dalam proses kebijakan tersebut diantaranya:

a. *Elected Official* (Pejabat Terpilih)

Keterlibatan pejabat terpilih dalam proses kebijakan dibagi menjadi dua yaitu eksekutif dan legislatif serta partai politik.

b. Pejabat yang ditunjuk (*Appointed Official*)

Pejabat yang ditunjuk berkenaan dengan kebijakan publik dan administrasi seringkali disebut sebagai birokrasi. Birokrasi merupakan sumber kekuasaan pemerintah yang penting. Sebagai sumber kekuasaan pemerintah karena birokrasi merupakan simbol dan alat bagi kekuasaan pemerintah.

c. Kelompok Kepentingan (*Interest Group*)

Pembuatan kebijakan seringkali identik dengan pemerintah, khususnya para eksekutif dan legislatif, namun realitas politik modern memberikan ruang kelompok kepentingan memainkan peran pentingnya dalam proses kebijakan. Walaupun kelompok kepentingan berbeda hubungan dan aktivitasnya, namun kelompok tersebut memberikan tuntutan- tuntutan, alternatif-alternatif tindakan kebijakan dan memberikan informasi kepada pejabat publik.

d. Organisasi-organisasi penelitian (*Research Organization*)

Aktor sosial lain yang memiliki peran signifikan dalam proses kebijakan adalah para peneliti yang bekerja di lingkungan universitas dan think tanks. Peneliti-peneliti universitas memiliki kepentingan teoritis dan filosofi dalam masalah publik yang mungkin hasil penelitiannya dapat diterjemahkan dalam tujuan kebijakan.

e. Media Massa

Peran media massa dalam proses kebijakan publik terletak pada fakta bahwa dalam pelaporan masalah mereka yang memadukan peran reporter pasif dan analisis aktif sebagai penasihat untuk pemecahan masalah.

f. Organisasi Negara

Pembuatan kebijakan publik menjadi prerogatif pemerintah dan aktor-aktor kunci dalam sub-sistem kebijakan. Dua hal yang membuat Negara mampu membuat dan menjalankan kebijakan adalah otonomi dan kapasitas.

g. Organisasi Masyarakat

Kapabilitas sebuah Negara ditentukan tidak saja bagaimana Negara dijalankan, tetapi juga bagaimana Negara berhubungan dengan masyarakatnya, bagaimana masalah publik dapat dipecahkan melalui kebijakan.

h. Organisasi Sistem Internasional

Menganalisis keterlibatan peran lembaga internasional lebih daripada memperkirakan keterlibatan peran aktor domestik.

Dalam penelitian ini akan menggunakan teori identifikasi aktor yang dikemukakan oleh Blackman (2003) dimana aktor diklasifikasikan menjadi dua yakni aktor primer dan aktor sekunder. Teori ini dipilih karena relevan dengan topik penelitian dimana dalam Implementasi Kebijakan Pemberian Penghargaan Pemuda Berprestasi di Kabupaten Wonogiri hanya melibatkan dua pelaku utama yang dibedakan menjadi aktor primer dan aktor sekunder. Dimana setiap aktor tersebut memiliki peran nya masing-masing baik sebagai pembuat kebijakan, koordinator, fasilitator, akselerator maupun implementor.

1.5.9. Peran Aktor

Peran aktor didefinisikan sebagai tugas kewajiban yang harus dilakukan oleh seseorang atau kelompok dalam implementasi sebuah kebijakan. Menurut Nugroho (dalam Handayani dan Warsono, 2017) *stakeholder* dalam program pembangunan diklasifikasikan berdasarkan peranannya, antara lain:

- a) *Policy creator* yaitu *stakeholder* yang memiliki peranan dalam mengambil keputusan serta menentukan sebuah kebijakan. Dalam hal ini *Policy Creator* merupakan aktor pemerintah.
- b) Koordinator yaitu *stakeholder* yang perannya melakukan koordinasi dengan *stakeholder* lain. Aktor yang memiliki peran sebagai koordinator bisa berasal dari aktor pemerintah, LSM, maupun aktor lainnya.

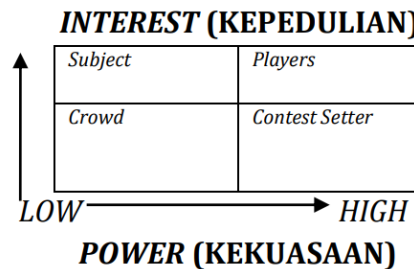
- c) Fasilitator yaitu *stakeholder* yang memiliki peran untuk memberikan fasilitasi serta memenuhi apa yang diperlukan oleh kelompok sasaran. Aktor yang memiliki peran sebagai fasilitator biasanya merupakan sektor swasta.
- d) Implementer yaitu *stakeholder* yang melaksanakan kebijakan dimana didalamnya ada kelompok sasaran.
- e) Akselerator yaitu *stakeholder* yang fungsinya mempercepat serta berkontribusi supaya suatu program bisa berjalan sesuai tujuan dan bahkan dapat lebih cepat waktu pencapaiannya. Aktor yang berperan sebagai akselerator biasanya berasal dari aktor LSM.

Sedangkan Biddle dan Thomas membagi peristilahan dalam teori peran dalam empat golongan, yaitu:

- a) Orang-orang yang mengambil bagian dalam interaksi sosial.
- b) Perilaku yang muncul dalam interaksi tersebut;
- c) Kedudukan orang- orang dalam perilaku dan
- d) Kaitan antara orang dan perilaku.

Menurut Bryson dalam Hardiansyah (2012:190) analisis peran pemangku kepentingan (*stakeholder*) dimulai dengan menyusun *stakeholder* pada matriks dua kali dua menurut *interest* (minat) *stakeholder* terhadap suatu masalah dan *power* (kekuasaan) *stakeholder* dalam mempengaruhi masalah tersebut. *Interest* adalah minat atau kepentingan *stakeholder* terhadap pembangunan. Sedangkan yang dimaksud dengan *power* adalah kekuasaan

stakeholder untuk mempengaruhi atau membuat kebijakan maupun peraturan-peraturan Pembangunan.



Sumber: Hardiansyah (2012:191)

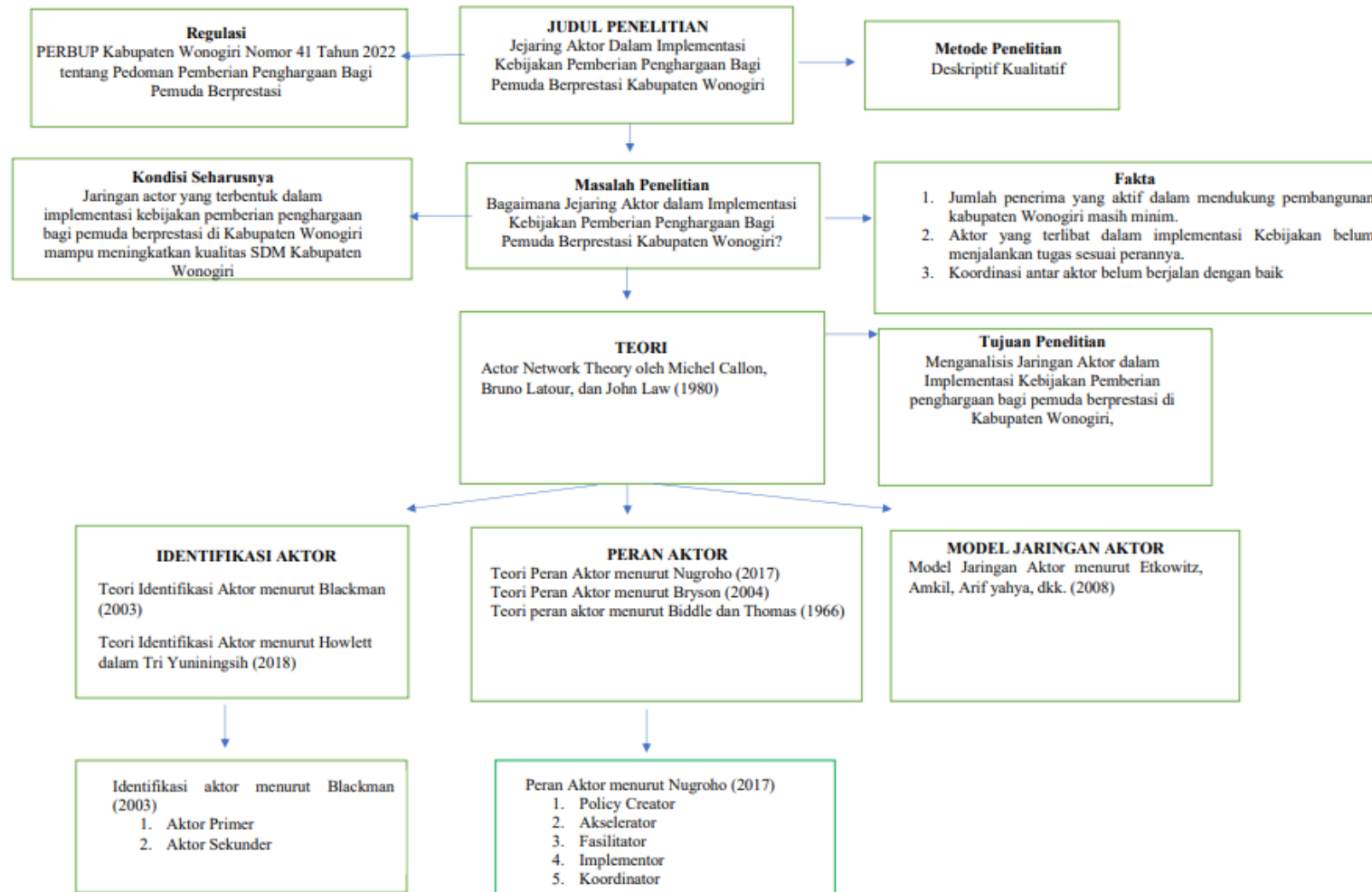
Gambar 1.4. Matriks Analisis Peran *Stakeholder* dari Bryson

Gambar tersebut dapat dicermati sebagai berikut;

- a) *Contest setter*, memiliki pengaruh yang tinggi tetapi sedikit kepentingan. Oleh karena itu, mereka dapat menjadi risiko yang signifikan untuk harus dipantau,
- b) *Players*, merupakan *stakeholder* yang aktif karena mereka mempunyai kepentingan dan pengaruh yang tinggi terhadap pengembangan suatu proyek/ program,
- c) *Subject*, memiliki kepentingan yang tinggi tetapi pengaruhnya rendah dan walaupun mereka mendukung kegiatan, kapasitasnya terhadap dampak mungkin tidak ada. Namun mereka dapat menjadi pengaruh jika membentuk aliansi dengan *stakeholder* lainnya
- d) *Crowd*, merupakan *stakeholder* yang memiliki sedikit kepentingan dan pengaruh terhadap hasil yang diinginkan dan hal ini menjadi pertimbangan untuk mengikut sertakannya dalam pengambilan

keputusan. Pengaruh dan kepentingan akan mengalami perubahan dari waktu ke waktu, sehingga perlu menjadi bahan pertimbangan. Berdasarkan teori peran aktor dari beberapa ahli di atas, penelitian ini akan menggunakan teori peran aktor yang dikemukakan oleh Nugroho (2017) dimana peran aktor terbagi menjadi 5 diantaranya *Policy Creator*, koordinator, fasilitator, Implementer, dan akselerator.

1.6. Kerangka Berpikir Teoretis



Sumber: Blackman (2003), Nugroho (2017). Etkowitz, dkk, Tri Yuniningsih (2018), Warella Y (1997), Anderson (1997), Bruno Latour (1980), Bryson (2004), Biddle dan Thomas (1966).

1.7. Operasionalisasi Konsep

Operasionalisasi konsep sebagai suatu unsur pada sebuah penelitian supaya permasalahan utama yang nantinya akan diteliti menjadi lebih fokus. Penelitian ini memiliki tujuan menganalisis jejaring aktor dalam implementasi kebijakan pemberian penghargaan bagi pemuda berprestasi di Kabupaten Wonogiri. Pada penelitian ini Fenomena yang diteliti adalah sebagai berikut:

1) Identifikasi aktor

Identifikasi aktor adalah pemetaan aktor berdasarkan keterlibatan dan kepentingannya. Identifikasi pemangku kepentingan yang terlibat dalam penelitian ini adalah Aktor Primer dan Aktor Sekunder. Pemetaan aktor tersebut didasarkan pada tingkat pengaruh, keterlibatan dan kepentingan dari masing-masing aktor yang terlibat sebagaimana pada tabel berikut

Tabel 1.5. Identifikasi Aktor

Aktor	Ketertarikan	Tingkat Pengaruh
Primer	Tinggi	Tinggi
Sekunder	Rendah	Rendah

Aktor yang memiliki pengaruh dan ketertarikan yang tinggi dalam implementasi kebijakan disebut sebagai aktor primer, sedangkan aktor yang memiliki ketertarikan rendah dan tingkat pengaruh rendah disebut sebagai aktor sekunder.

2) Peran Aktor

Peran aktor yaitu peran antar aktor yang berpartisipasi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, yaitu:

- a) *Policy Creator* merupakan aktor yang berperan dalam pembuatan kebijakan. Aktor yang memiliki peran ini biasanya merupakan aktor yang memiliki tingkat pengaruh dan kekuasaan yang tinggi seperti Pemerintah.
- b) Fasilitator merupakan aktor yang berperan dalam memfasilitasi implementasi suatu kebijakan. Aktor yang berperan sebagai fasilitator berasal dari sektor yang beragam bisa dari swasta, LSM, atau Lembaga lainnya yang membantu dalam keberjalanan implementasi suatu kebijakan.
- c) Akselerator merupakan aktor yang memiliki peran dalam mempercepat implementasi suatu kebijakan. Aktor yang memiliki peran sebagai akselerator berasal dari sektor yang beragam bisa dari organisasi pemuda daerah, LSM, Atau aktor lainnya.
- d) Koordinator merupakan aktor yang berperan dalam mengkoordinasi dan menjadi penghubung antara satu aktor dengan aktor lainnya dalam implementasi suatu kebijakan.
- e) Implementer merupakan aktor yang berperan dalam mengimplementasikan suatu kebijakan. Dalam hal ini kelompok sasaran juga termasuk dalam implementor.

3) Model Jaringan Aktor

Model jaringan aktor merupakan pemetaan pola jaringan aktor yang terbentuk dalam implementasi suatu kebijakan. Model jaringan aktor dibagi menjadi 3 yaitu *Triple Helix*, *Quadruple Helix*, dan *Pentahelix*.

- a. *Triple Helix* merupakan model jaringan aktor yang melibatkan 3 aktor diantaranya pemerintah, swasta dan akademisi.
- b. *Quadruple Helix* merupakan model jaringan aktor yang melibatkan 4 aktor yang terdiri dari pemerintah swasta, akademisi dan Masyarakat.
- c. *Pentahelix* merupakan model jaringan aktor yang melibatkan 5 aktor yang meliputi pemerintah, swasta, akademisi, Masyarakat dan media massa.

1.8. Metode Penelitian

1.8.1. Desain Penelitian

Desain penelitian ini yaitu penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif dipilih peneliti guna mempelajari suatu obyek ilmiah, dalam hal ini peneliti sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan datanya adalah triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih mengutamakan kepentingannya sebagai generalisasi (Sugiyono, 2015:9). Pendekatan kualitatif ini mengambil data dari berbagai sumber untuk menentukan kebenaran informasi spesifik dari berbagai metode dan sumber pengumpulan data. Biasanya, peneliti memperoleh informasi dari wawancara langsung dengan subyek penelitian. Oleh sebab itu, metode kualitatif yang digunakan dalam penelitian dapat mengarah pada

kajian fenomena yang lebih komprehensif. Berada di tempat dan berinteraksi langsung dengan aktor yang terlibat.

1.8.2. Tipe Penelitian

Ada berbagai jenis penelitian termasuk penelitian deskriptif dan eksplanatif. Jenis penelitian yang dipakai dalam penelitian ini yaitu penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif dipergunakan untuk mencari informasi sebanyak-banyaknya tentang objek penelitian dalam waktu tertentu (Hidayat Syah dalam Samsa, 2017). Seperti Shah, Saifullah (2013) juga menjelaskan konsep penelitian deskriptif bahwa tujuan penelitian deskriptif adalah untuk menggambarkan fenomena yang terjadi sekarang atau di masa lalu.

Menurut Setyosar (2010), penelitian deskriptif merupakan penelitian yang memiliki tujuan untuk menjelaskan atau menggambarkan keadaan, objek dan peristiwa seseorang, atau sesuatu yang berkaitan dengan variabel yang dapat dijelaskan dengan angka atau kata-kata. Penelitian deskriptif tidak berurusan dengan hubungan antara variabel yang ada karena tujuan penelitian deskriptif bukan untuk menarik generasi yang akan mewujudkan suatu gejala, fenomena atau realitas sosial dengan cara tersebut. Dalam penelitian ini peneliti berusaha mengungkapkan secara mendalam tentang jejaring aktor dalam implementasi kebijakan pemberian penghargaan bagi pemuda berprestasi di Kabupaten Wonogiri.

1.8.3. Situs Penelitian

Situs merupakan lokus tempat pelaksanaan penelitian dimana fenomena yang dibahas dalam penelitian terjadi. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Wonogiri. Adapun alasan pemilihan lokasi penelitian di Kabupaten Wonogiri yaitu karena Kabupaten Wonogiri merupakan satu-satunya kabupaten di Jawa Tengah yang menginisiasi adanya Kebijakan pemberian penghargaan bagi pemuda berprestasi. Implementasi kebijakan ini dilatarbelakangi karena kualitas SDM di Kabupaten Wonogiri yang masih sangat rendah. Selain itu Kabupaten Wonogiri beberapa kali didatangi oleh daerah lain untuk melakukan studi banding dan inovasi kebijakan tersebut berhasil membawa Kabupaten Wonogiri sebagai daerah Terinovatif di Indonesia pada tahun 2021.

1.8.4. Subjek Penelitian

Objek penelitian ini merupakan individu maupun kelompok yang berperan sebagai penyedia data informasi yang paham dengan fenomena yang akan diteliti sesuai dengan bidang keahliannya masing-masing. *Purposive sampling* digunakan dalam penelitian ini. *Purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel di mana sumber informasi didasarkan pada aspek-aspek khusus, seperti orang yang diyakini paling tahu tentang topik yang relevan (Sugiyono:218-219). Penelitian ini juga menggunakan Teknik *Snowball* untuk menentukan informan dalam penelitian. Menurut Sugiyono (2014) *snowball sampling* merupakan teknik penentuan sampel yang mula- mula jumlahnya kecil, kemudian membesar. Adapun informan

dari penelitian ini yaitu *Stakeholders* yang terlibat langsung dan mengetahui secara mendalam mengenai Implementasi Kebijakan Pemberian Penghargaan Bagi Pemuda Berprestasi Kabupaten Wonogiri. Informan dalam penelitian ini:

- 1) Kepala bidang kepemudaan DISPORAPAR Kabupaten Wonogiri
- 2) Anggota IMAPRES (Ikatan Mahasiswa Berprestasi) Kabupaten Wonogiri
- 3) Camat Kecamatan Giritontro
- 4) DPMPTSP Kabupaten Wonogiri

Penentuan informan dalam penelitian ini didasarkan oleh beberapa indikator diantaranya intensitas interaksi dengan Imapres Wonogiri selaku penerima manfaat, berdasarkan intensitas keterlibatan serta tingkat pengaruh dalam implementasi program.

1.8.5. Fenomena Penelitian

Fenomena yang akan diamati dalam penelitian dengan judul “Jejaring Aktor Dalam Implementasi Kebijakan Pemberian Penghargaan Bagi Pemuda Berprestasi Kabupaten Wonogiri” diantaranya:

Tabel 1.5. Fenomena Penelitian

No	Fenomena	Sub Fenomena	Gejala yang diamati	Informan
1	Identifikasi Aktor	Ketertarikan	Bagaimana tingkat ketertarikan aktor dalam implementasi kebijakan. Aktor yang memiliki tingkat ketertarikan yang tinggi maka	• Kepala bidang kepemudaan DISPORAPAR Kabupaten Wonogiri

			disebut aktor primer. Sedangkan aktor yang memiliki tingkat ketertarikan yang rendah disebut aktor sekunder	• Ketua IMAPRES (Ikatan Mahasiswa Berprestasi) Kabupaten Wonogiri • Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang diwakili oleh DPMPTSP • Camat kecamatan Giritontro Kabupaten Wonogiri
		Tingkat Pengaruh	Bagaimana tingkat pengaruh aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan. Semakin tinggi tingkat pengaruhnya maka disebut aktor primer. Sedangkan aktor yang memiliki tingkat pengaruh rendah disebut aktor sekunder.	
2	Peran Aktor	Interest	1. Aktor yang memiliki kepedulian tinggi dan kekuasaan yang tinggi dalam pembuatan kebijakan disebut sebagai <i>policy creator</i> 2. Aktor yang memiliki kepedulian	
Kekuasaan				

			tinggi untuk memberikan fasilitas dalam implementasi kebijakan namun memiliki kekuasaan yang rendah disebut sebagai fasilitator. 3. Aktor yang memiliki kepedulian tinggi dalam implementasi kebijakan namun kekuasaannya rendah disebut sebagai koordinator. 4. Aktor yang memiliki kepedulian yang tinggi dalam mempercepat implementasi kebijakan, namun memiliki kekuasaan rendah disebut	
--	--	--	--	--

			sebagai akselerator. 5. Aktor yang memiliki kepedulian rendah dan kekuasaan yang rendah dalam implementasi kebijakan disebut sebagai implementer termasuk didalamnya kelompok sasaran.	
3	Model Jaringan Aktor	<i>Triple Helix</i>	Pemetaan model jaringan aktor dalam implementasi kebijakan pemberian penghargaan bagi pemuda berprestasi di Kabupaten Wonogiri	
		<i>Quadruple Helix</i>		
		<i>Pentahelix</i>		

Sumber: Diolah Penulis (2023)

1.8.6. Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian kualitatif menurut Lofland dan Lofland dalam Moloeong (2009:157) hasil dari perkataan dan perbuatan, selebihnya merupakan informasi tambahan berupa dokumen dan lain-lain. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, catatan lapangan, sumber data tertulis dan foto yang menggambarkan bagaimana Jejaring aktor dalam implementasi kebijakan pemberian penghargaan bagi pemuda berprestasi Kabupaten Wonogiri. Adapun data menurut Sugiyono (2015:137) bila dilihat dari sumber data menggunakan dua sumber data yaitu:

a. Data Primer

Data primer didefinisikan sebagai data yang didapatkan secara langsung dari subjek penelitian menggunakan alat mengambil data secara langsung. Informasi dasar biasanya diperoleh dari wawancara. Data primer dalam penelitian ini yaitu hasil wawancara dari Kepala bidang kepemudaan DISPORAPAR Kabupaten Wonogiri, ketua IMAPRES (Ikatan Mahasiswa Berprestasi) Kabupaten Wonogiri, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang diwakili oleh DPMPTSP dan Camat Kecamatan Giritontro di Kabupaten Wonogiri.

b. Data Sekunder

Informasi sekunder adalah informasi yang didapat secara tidak langsung atau melalui pihak lain. Informasi sekunder biasanya diperoleh dari informasi dokumenter. Data sekunder dalam penelitian ini adalah

data dari Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Wonogiri, peraturan yang berlaku di Kabupaten Wonogiri yakni Perbup No 41 Tahun 2022, jurnal, dan studi pustaka yang mendukung penelitian.

1.8.7. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini bersumber dari data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan berbagai metode yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Menurut Sugiyono (2009:224) Teknik pengumpulan data adalah suatu tindakan yang paling strategis didalam penelitian sebab tujuan utamanya yakni untuk mendapatkan informasi. Sugiyono (2009:225) juga menyatakan bahwa didalam penelitian kualitatif, pengumpulan data berlangsung dalam keadaan yang alamiah (natural environment), sumber data primer dan teknik pengumpulan data utamanya adalah observasi, wawancara dan dokumentasi.

a. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dipergunakan untuk mengamati objek yang diteliti. Pengamatan dilakukan secara langsung dari kegiatan atau peristiwa yang terjadi di lokasi penelitian. Sanafiah Faisal dalam Sugiyono (2016:226) menyatakan bahwa observasi dibagi menjadi observasi partisipatif, observasi terang-terangan dan samar-samar, dan observasi tidak terstruktur.

Pada penelitian di Kabupaten Wonogiri pengumpulan data dilakukan melalui observasi terus terang atau tersamar. Jenis observasi

ini dipilih peneliti karena peneliti menyatakan secara terus terang kepada pihak terkait saat akan melakukan penelitian.

b. Wawancara

Peneliti melakukan wawancara untuk memperoleh informasi yang mendalam dan menemukan jawaban atas pertanyaan yang jelas dan ringkas. Teknik pengumpulan data ini didasarkan pada laporan diri atau *selfreport* (Sugiyono, 2015:231). Esterberg dalam Sugiyono (2016: 233) menyajikan berbagai jenis wawancara, yaitu wawancara terstruktur, semi terstruktur, dan tidak terstruktur.

Pada penelitian di Kabupaten Wonogiri pengumpulan data dilakukan dengan wawancara semistruktur dimana saat melakukan wawancara dengan narasumber selain memberi pertanyaan sesuai dengan pedoman wawancara juga pertanyaan di luar pedoman wawancara. Wawancara dilakukan dengan Kepala bidang kepemudaan DISPORAPAR Kabupaten Wonogiri, Ketua IMAPRES (Ikatan Mahasiswa Berprestasi) Kabupaten Wonogiri, DPMPTSP Kabupaten Wonogiri dan Camat Kecamatan Giritontro Kabupaten Wonogiri.

c. Dokumentasi

Pengumpulan data ini dengan dokumen. Dokumen tersebut bisa dalam bentuk tulisan, gambar, dan lain-lain. Dokumen ini merupakan pelengkap pada penggunaan metode observasi dan wawancara pada penelitian kualitatif.

1.8.8. Analisis dan Interpretasi Data

Sugiyono (2016:246) menunjukkan bahwa dalam penelitian kualitatif, analisis data terjadi ketika pengumpulan data terjadi dan ketika pengumpulan data telah diselesaikan sesuai jangka waktu yang ditentukan. Pada saat wawancara, peneliti akan menganalisis jawaban responden. Jika setelah dianalisis ternyata jawaban responden kurang memuaskan, peneliti akan menanyakan kembali pertanyaan tersebut sampai batas tertentu sampai diperoleh informasi yang dianggap dapat dipercaya. Komponen analisis data Miles dan Huberman yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a) *Data Reduction* (Data Reduksi) yaitu meringkas, memilih pokok-pokok, berfokus pada pokok-pokok utama dan mencari topik dan pola. Adanya reduksi data memberikan penjelasan yang sederhana dan jelas.
- b) *Data Display* (Penyajian Data) yaitu representasi data dalam berbagai format, termasuk deskripsi singkat, diagram, hubungan antar kelas, diagram alur, dan lainnya.
- c) *Conclusion Drawing* (Penarikan Kesimpulan) merupakan kegiatan setelah menyajikan data, peneliti akan menarik kesimpulan dan ulasan. Kesimpulan pertama yang disajikan masih bersifat awal, namun kesimpulan akan dijadikan kesimpulan akhir yang kredibel ketika ditemukan bukti kuat dari pengumpulan data lapangan yang mendukung, valid dan konsisten.

Pada penelitian di Kabupaten Wonogiri sesudah pengumpulan data lapangan, setelah itu dilakukan reduksi data untuk meringkas dan memilah data yang diperlukan, lalu hasil reduksi data disiapkan atau dilakukan display dan terakhir dilakukan adanya penarikan kesimpulan.

1.8.9. Kualitas Data

Guna memperoleh kualitas data yang valid dalam penelitian ini memakai teknik triangulasi. Triangulasi adalah teknik untuk memverifikasi informasi dari sumber, metode, dan waktu yang berbeda (Sugiyono, 2016:273). Macam-macam triangulasi menurut Sugiyono adalah:

a) **Triangulasi Sumber**

Triangulasi sumber adalah uji validitas dengan memeriksa data yang didapat dari berbagai sumber.

b) **Triangulasi Teknik**

Triangulasi teknis adalah tes kredibilitas yang menggunakan wawancara, kemudian melalui studi pustaka, dokumentasi dan observasi, melalui teknik yang berbeda untuk mengecek data dari sumber yang sama.

c) **Triangulasi Waktu**

Triangulasi waktu dapat dilakukan dengan melakukan pengecekan kembali terhadap data kepada sumber dan tetap menggunakan teknik yang sama, namun dengan waktu atau situasi yang berbeda.

Penelitian ini memakai pengujian data dari beberapa sumber, dimana peneliti tidak mendasarkan pada wawancara dengan satu informan tetapi juga wawancara dengan informan yang berbeda. Data tersebut kemudian dianalisis dan disesuaikan dengan hasil observasi dan dokumentasi.